

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perdamaian merupakan hal yang diidam-idamkan oleh semua manusia di seluruh pelosok dunia. Tidak hanya orang yang sedang dalam pertikaian ingin berdamai, bagi yang dalam keadaan damai pun akan mencoba pertahankan status *quo*. Sudah semenjak awal kelahirannya, ilmu hubungan internasional mempelajari fenomena damai dan peperangan, sebagai upaya untuk menjalin pengertian antar negara.

Politik luar negeri bukan hanya perpanjangan dari politik dalam negeri suatu negara, tetapi juga merupakan suatu reaksi terhadap tantangan berat yang disebabkan oleh perkembangan tatanan dan dinamika internasional dimana negara saling berinteraksi. Pemahaman politik luar negeri seperti ini semakin signifikan dirasakan dewasa ini, ketika hubungan internasional mengalami perubahan dan perkembangan yang begitu cepat, ditandai dengan beragamnya isu dan aktor yang berperan.

Usaha perdamaian dan persatuan kembali Korea menarik minat penulis untuk meneliti mengapa Korea Utara membatalkan perjanjian yang dirintis selama hampir 10 tahun.

Selain alasan diatas tersebut, penulis tertarik mengambil judul skripsi ini karena belum pernah diangkatnya judul yang bersangkutan sebagai judul skripsi

di program studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Melihat fenomena aneh dan alasan ke dua inilah yang mendorong penulis untuk menganalisa lebih jauh permasalahan Korea Utara membatalkan perjanjian. Permasalahan tersebut penulis rumuskan dalam sebuah judul skripsi yaitu: **Faktor-Faktor Korea Utara Membatalkan Perjanjian Reunifikasi Korea.**

B. Latar Belakang Masalah

Korea pada awalnya merupakan kerajaan yang merdeka dan satu di bawah kekuasaan raja Sunjong. Namun semenjak tanggal 22 Agustus 1910 Jepang menduduki Korea berdasarkan perjanjian pendudukan Jepang – Korea yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Yi Wan-Yong. Oleh Raja Sunjong perjanjian ini diumumkan 7 hari kemudian atau tepat pada tanggal 29 Agustus 1910¹. Ketidaksetujuan rakyat Korea mencapai klimaks pada tanggal 1 Maret tahun 1919 dengan mengadakan demonstrasi damai yang dikenal dengan gerakan 1 Maret. Demonstrasi ditanggapi Jepang dengan tindakan kekerasan yang menyebabkan jatuh korban 7500 meninggal dan 16.000 terluka dari rakyat Korea².

Memasnya perang dunia II memberikan momentum yang baik bagi Korea untuk mempersiapkan pasukan untuk melawan Jepang. Dengan membentuk pasukan restorasi Korea (Han-Guk Kwangbokkun) pada tahun 1940 yang termasuk pasukan militer Korea. Persiapan lainnya adalah menciptakan kerjasama dan hubungan dengan komunis Cina. Dari sisi perjuangan luar negeri,

¹ Yang Seung-Yoon dan Nur Aini Setiawati, Sejarah Korea Sejak Awal Abad Hingga Masa Kontemporer (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2003)hlm.134

² <http://www.asianinfo.org/asianinfo/korea/history.htm>

tokoh-tokoh seperti Rhee Syngman yang berada di Cina dan Kim Sung Il yang ada di Uni Soviet berencana untuk kembali dan memulai kembali perjuangan mereka.³

Merasa semakin terjepit Jepang mencoba mencari dukungan dari tokoh Korea agar penguasaan mereka terhadap Korea tetap berlangsung. Mendapat posisi tawar Yu On-Hyung meminta Jepang untuk memperbolehkan persiapan kemerdekaan yang diperbolehkan oleh kekaisaran Jepang. Persiapan berjalan mulus hingga 15 Agustus 1945 Korea memperoleh kemerdekaan.

Perayaan kemerdekaan tidak berlangsung lama. Masuknya dua kekuatan ideologi “raksasa” membagi Korea tepat pada garis lintang utara 38 derajat. Dua “raksasa” adalah Amerika Serikat yang menduduki wilayah selatan dan Uni Soviet yang menduduki wilayah lainnya. Tindakan kedua negara “raksasa” ini berdasarkan keputusan tiga menteri (Inggris, Uni Soviet dan Amerika Serikat) yang memutuskan bahwa di Korea akan dibentuk pemerintah perwalian dengan pembagian seperti yang diatas. Pemerintahan perwalian ini akan diawasi oleh PBB dan akan berlangsung selama 5 tahun. Pemerintah perwalian ini jelas bertentangan dengan republik rakyat Korea dan ditentang secara keras oleh rakyat Korea. Kemerdekaan Korea juga menandai berakhirnya perang dunia kedua.

Campur tangan kedua negara mampu membuat suara Korea terpecah khususnya dalam barisan pimpinan perjuangan kemerdekaan. Uni soviet mendukung Kim Sung Il untuk membuat pemerintahan sendiri tentunya dibawah bendera komunis, sedangkan pada bagian selatan, Amerika Serikat mendukung

³ *Op.cit*, hlm.186

Rhee Shyngman sebagai pemimpin Korea Selatan. Adanya 2 calon pemimpin menciptakan kebuntuan di Korea, hingga masalah ini diserahkan Amerika Serikat kepada PBB. PBB kemudian membentuk UNTCOK atau *United Nation Temporary Commision on Korea* yang dibentuk pada tanggal 7 November 1947⁴ dan bertujuan sebagai panitia penyelenggara pemilu dimana yang terpilih dalam pemilu ini akan menjadi pemimpin semenanjung Korea. Panitia ini dibentuk oleh PBB dan akan menyebar diseluruh semenanjung Korea. Penyebaran panitia tidak berjalan sesuai rencana karena dari pihak Korea belahan utara tidak mengizinkan panitia untuk melintasi garis batas 38 derajat.

Seperti yang dijadwalkan pada bulan Mei tahun 1948 tetap diadakan pemilu. Dari pemilu melahirkan Republik Korea (Republic of Korea) dengan dasar negara demokrasi kapitalis dengan presiden pertama Rhee Syngman tepat pada tanggal 15 Agustus 1948. Hasil pemilu di Korea belahan selatan dibalas juga dengan pemilu di Korea belahan utara pada tanggal 25 Agustus 1948 dengan hasil akhir terpilihnya Kim Sung-Il sebagai perdana menteri. Korea belahan utara memproklamirkan diri dengan nama Democratic People's Republic of Korea dengan paham komunis. Kedua Korea mengklaim bahwa merekalah pemerintah yang *legitimate* di semenanjung Korea.

Hingga akhir tahun 1948 Korea Utara ditinggal oleh Uni Soviet dan pada Juni 1949 Amerika Serikat juga meninggalkan Korea Selatan. Kepergian dua kekuasaan dari Semenanjung Korea tidak menyurutkan keinginan kedua negara untuk menguasai satu sama lain hingga menciptakan atmosfer permusuhan di

⁴ <http://www.tabblo.com/studio/stories/view/1723655/>

Semenanjung Korea. Permusuhan mencapai klimaks pada tanggal 25 Juni 1950 ketika Korea Utara menyerang Korea Selatan dengan persenjataan yang dibantu oleh Uni Soviet. Tidak lama setelah agresi Korea Utara terhadap Korea Selatan, PBB segera meminta Korea Utara untuk menghentikan serangan. Penyerangan yang tidak terduga ini memaksa Korea Selatan mundur hingga meninggalkan ibu kota Seoul dan memindahkan pusat pemerintahan di Busan pada tanggal 27 Juni di tahun yang sama. Perang saudara ini dikatakan juga sebagai perang yang dimandatkan (proxy war), karena perang ini juga didanai dan didukung oleh dua kekuatan ideologi.

Terpukul mundurnya Korea Selatan dari Seoul mendesak PBB untuk mengirimkan bantuan dengan cara mengirimkan tentara gabungan 16 negara. Bantuan dari PBB merubah perimbangan kekuatan kedua Negara. Korea Utara berhasil dipaksa mundur hingga ke Sungai Nakdong⁵. Kewalahan menghadapi tentara gabungan, Korea Utara kemudian dibantu oleh pasukan Cina, tepatnya pada bulan Oktober 1950. Kehadiran Cina dalam peperangan ini karena Cina sendiri merasa terancam dengan kekalahan oleh Korea Utara yang dapat menyebabkan berpindahnya arena perang ke Cina. Kekhawatiran Cina berdasarkan pada pernyataan terbuka oleh Jendral Douglas MacArthur yang mengatakan bahwa akan menyerang wilayah Cina (bahkan dengan bom atom).⁶ Pengaruh dari perang dingin antara komunis dan barat menjadi sangat terlihat dengan hadirnya pasukan gabungan yang membantu Korea Selatan dan kemudian

⁵ Yang Seung-Yoon dan Nur Aini Setiawati, Sejarah Korea Sejak Awal Abad Hingga Masa Kontemporer (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2003)hlm.191

⁶ Walter S Jones, Logika Hubungan Internasional Kekuasaan Ekonomi Politik Internasional, dan Tatanan Dunia (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama)hlm. 96

pasukan Cina membantu Korea Utara, maka terjadi keseimbangan kekuatan perang di kedua belah pihak.

Kekuatan persenjataan yang seimbang dan gagalnya kedua pasukan untuk dapat bergerak lebih jauh mendorong kedua belah pihak untuk melakukan perundingan yang berlangsung lebih dari dua tahun. Perang saudara pun berakhir pada titik 38 derajat lintang utara. Tepat pada tanggal 3 Juli 1953 perang Korea dihentikan dengan cara Korea Utara, Amerika Serikat dan Cina menandatangani perjanjian gencatan senjata. Presiden Korea Selatan menolak untuk menandatangani perjanjian ini namun ia berjanji untuk menghormati perjanjian ini. Dengan adanya perjanjian gencatan senjata berarti perang Korea belum secara resmi dihentikan.

Penghentian perang dan penandatanganan perjanjian gencatan senjata hanyalah penyelesaian militer namun tidak dalam penyelesaian politik. Dalam hal demikian kedua negara kemudian melakukan pertimbangan kekuatan perang. Pertimbangan kekuatan perang di semenanjung Korea merupakan pertimbangan yang sangat kritis. Perang kapan saja bisa terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Pasca perang Korea, kedua Korea mulai saling membuka komunikasi. Hubungan antara keduanya menjadi sangat kompleks. Hubungan tidak sekedar persaingan dan permusuhan namun juga menuju ke arah kerjasama dan penyatuan kembali Korea. Usaha ini pertama kali dirintis oleh presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung, pada tahun 1998 yang mencoba untuk mencairkan kebuntuan politik kedua negara dengan mengadakan KTT. Rencana KTT disinggung oleh presiden

Korea Selatan, Kim Dae Jung, dalam pidatonya di Berlin pada bulan Maret tahun 2000. Kim Dae Jung juga menyebutkan agenda dari pertemuan ini adalah masalah kerjasama pemerintahan, reuni keluarga Korea, dialog di kalangan pejabat pemerintah dan rekonsiliasi kedua Korea⁷. Rencana disambut hangat oleh pemerintahan Korea Utara dengan menyiapkan tempat. KTT diadakan di Pyongyang, ibu kota Korea Utara, pada tanggal 13 – 15 Juni 2000. Pertemuan ini berhasil memberikan kejutan terhadap dunia internasional apa lagi dengan munculnya pemimpin Korea Utara, Kim Jung Il. Pandangan internasional terhadap Kim Jung Il yang awalnya melihat sebagai tokoh yang buruk, kejam serta teroris berubah secara drastis. Pandangan terhadap Korea Utara juga berubah.

Tepat pada tanggal 13 Juni 2000 pesawat yang membawa presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung beserta 130 anggota rombongan mendarat di Pyongyang. Kedatangan presiden Korea Selatan tidak lain untuk menghadiri KTT antara Korea Selatan dan Korea Utara. KTT ini tidak hanya menjadi sejarah tapi juga merupakan kejutan bagi dunia. Betapa tidak, pimpinan Korea Utara secara pribadi menyambut dan menyalami presiden Korea Selatan di kaki tangga pesawat. Menjelang penutupan KTT pada jamuan siang, Kim Jung Il mau bergabung menyanyikan lagu berisikan harapan reunifikasi kedua Korea. Kim Jung Il juga memeluk Kim Dae Jung ketika akan berpisah di tangga pesawat.

KTT betul-betul membawa angin perubahan dalam hubungan kedua Korea. dalam KTT ini Korea Selatan mengusulkan format reunifikasi Korea yang

⁷ (*Kompas*, Rabu, 12 April 2000)

dapat diterima oleh Korea Utara. Korea Selatan mengusulkan bahwa format reunifikasi Korea adalah federasi yang berarti dua pemerintahan dua sistem. Sebelumnya Korea Utara bersikeras untuk menjalankan sistem konfederasi, yang memberi wewenang satu pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi diplomatik serta pertahanan, sementara pemerintah dibawah hanya berfungsi administratif negara. KTT juga menghasilkan dokumen yang berisikan lima poin kesepakatan yang menyebutkan kedua Korea akan berkerja secara independen untuk mengupayakan penyatuan Korea. Dokumen ini ditandatangani oleh kedua pimpinan Korea serta dicantumkannya jabatan masing masing dalam dokumen tersebut. Dalam KTT juga disetujui bahwa akan dibangun proyek yang berupa kawasan industri di kota perbatasan Korea Utara dan Selatan, yaitu Kaesong. Proyek ini dipelopori oleh perusahaan Hyundai Group.⁸

Adapun poin-poin penting dari reunifikasi ini adalah :

1. Kedua Korea akan berusaha mengadakan reunifikasi secara mandiri
2. Penggunaan sistem federasi dan kemakmuran bersama
3. Pertemuan keluarga terpisah dan penyelesaian masalah tawanan perang
4. Menciptakan keseimbangan pembangunan ekonomi nasional dengan meningkatkan kerjasama ekonomi dan saling percaya
5. Melakukan dialog antar pemerintah secepat mungkin sehingga mempercepat proses reunifikasi

⁸ (*Suara Merdeka*, Rabu, 25 September 2002)

Pencetus KTT berasal dari Korea Selatan, namun selang beberapa hari setelah KTT berakhir, mantan presiden Korea Selatan, Kim Yung-Sam bertemu dengan presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung. Kim Yung-Sam mengeritik keras KTT tersebut. Kim Yung-Sam menggambarkan Kim Jung Il sebagai diktator yang paling buruk dunia di bawah langit. Kim Yung-Sam juga berkata bahwa KTT membantu Kim Jung-Il “menghapus citranya sebagai seorang diktator dan menjadikannya sebagai seorang pendukung perdamaian dunia”. Kontan kritik ini menuai amarah pihak Korea Utara. Kecaman dan penghinaan yang terhenti semenjak KTT diserukan kembali oleh Korea Utara. Kecaman ditujukan kepada pribadi Kim Yung-Sam.⁹

Jeda yang cukup lama semenjak KTT Korea menarik Korea Utara berinisiatif mengajak Korea Selatan untuk mengadakan pertemuan kembali yang diterima oleh pemerintahan Seoul. Inisiatif ini disampaikan oleh Yang Hyong Sop, ketua partai yang berkuasa di Korea Utara.¹⁰ Pertemuan yang diminta Korea Utara merupakan tanda-tanda bahwa Korea Utara telah siap dengan siapa saja yang akan menjadi presiden baru Korea Selatan. Pertemuan ini juga bertujuan untuk meredam pengaruh barat terhadap rekonsiliasi kedua Korea. Korea Utara juga mengundang empat mantan dubes Amerika Serikat untuk Korea Selatan untuk datang ke Korea Utara pada bulan Februari. Ini merupakan pertanda bahwa Korea Utara siap untuk melakukan perundingan dengan Washington.

Hubungan kedua Korea terlihat semakin mesra pada pesta olah raga Asian Games yang diadakan di Korea Selatan pada tahun 2002. Kedua Korea tidak

⁹ (*Kompas*, Sabtu, 4 Juni 2000)

¹⁰ (*Kompas*, Kamis, 4 Januari 2002)

hanya sepakat untuk menggunakan bendera unifikasi tapi juga mengadakan pawai bersama dalam perhelatan akbar ini. Kesepakatan ini tercapai setelah dilakukannya pertemuan selama tiga hari oleh kedua Korea.¹¹

Reunifikasi membutuhkan dana sangat besar. Perekonomian Korea Utara juga sangat jauh dibawah perekonomian Korea Selatan. Berdasarkan usulan Hyundai Group untuk membangun kawasan industri yang kemudian disetujui dalam KTT Korea tahun 2000 sebagai bentuk investasi dan pengembangan ekonomi kedua Korea serta sebagai lambang persatuan Korea. Maka pada Desember 2004 kawasan industri Kaesong pun dibuka. Pembangunan kawasan industri Kaesong dimulai pada bulan Juni 2003 yang kemudian dilanjutkan ratifikasi pajak dan akuntansi oleh kedua Korea untuk menarik investor lebih banyak. Kaesong dapat menjadi penghasil uang bagi kedua Korea untuk mempersiapkan reunifikasi. Selain Kaesong, kedua Korea juga berkerja sama untuk membangun kawasan wisata yang mengunjungi pegunungan Kumbak.

Berlalu waktu hubungan kedua Korea pun semakin komplek. Hubungan yang pada awalnya hanya untuk memecah kebekuan hubungan kedua negara kemudian berkembang dalam hubungan ekonomi, sosial dan budaya. Kerja sama berjalan sangat jauh hingga mencapai wacana penyatuan kembali kedua Korea. Untuk menjalankan rencana ini maka dibentuklah kementrian unifikasi. Kementrian unifikasi bertugas untuk menangani hubungan bisnis kedua Korea serta komunikasi kedua Korea.

¹¹ (*Kompas*, Kamis, 29 Agustus 2002)

Pertemuan tingkat tinggi Korea kedua yang ditunggu akhirnya diselenggarakan dengan bertempat kembali di Pyongyang. Pertemuan yang diselenggarakan pada Oktober 2007 awalnya hanya sebagai manuver politik presiden Roh Moo Hyun agar mendapat simpati rakyat pada pemilihan presiden dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Namun pertemuan ini seperti yang yang ditulis Asian Calling edisi 13 Oktober 2007, bahwa hasil pertemuan puncak kedua Korea melebihi harapan rakyat negeri gingseng. Pertemuan ini menghasilkan penandatanganan deklarasi perjanjian damai di semenanjung Korea yang berarti mengakhiri perang di semenanjung Korea yang sebelumnya hanya berupa senjata senjata.

Salah satu kerjasama kedua Korea yang paling mengharukan adalah reuni keluarga. Reuni ini mempertemukan keluarga yang terpisah karena adanya perpisahan Korea. Pada awalnya reuni atau pertemuan ini dilakukan secara langsung atau dilakukannya kunjungan keluarga dari Korea Selatan ke Korea Utara atau sebaliknya. Kemudian semenjak tahun 2005 dibangun pusat reuni keluarga di daerah Gunung Geumgang. Pada pusat reuni keluarga, reuni dilakukan dengan cara yang berbeda yaitu melalui layar video. Pusat reuni ini untuk memfasilitasi orang tua yang sudah lemah fisiknya. Pusat reuni keluarga akhirnya rampung pada awal tahun 2008.

Situasi yang kritis tidak menyurutkan upaya untuk menggalang kerja sama dan penyatuan negara Korea. Namun sayangnya reunifikasi Korea mengalami kebuntuan ketika Korea Utara membatalkan perjanjian reunifikasi pada tanggal 30

Januari 2009.¹² Pembatalan ini dinyatakan oleh Komite untuk Reunifikasi Damai Korea.¹³ Padahal reunifikasi akan mendatangkan kedamaian dan kemakmuran di semenanjung Korea.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan pokok permasalahan yang bisa dijadikan objek penelitian yaitu :

Faktor - faktor apa saja yang mendorong Korea Utara membatalkan perjanjian reunifikasi ?

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam pengerjaan suatu penelitian khususnya di studi hubungan internasional diperlukan suatu kerangka dasar pemikiran atau teori- teori sebagai alat atau pisau analisa. Suatu hasil potongan tentunya akan sesuai dengan bentuk dari alat pemotong itu, oleh karena itu hasil dari penelitian akan sesuai dengan dengan teori-teori yang digunakan. Untuk melakukan analisis terhadap kebijakan yang diambil pemerintah Korea Utara untuk membatalkan perjanjian reunifikasi Korea maka teori yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah, *decision-making theory* (teori pembuatan keputusan), khususnya *foreign policy decision-making* (teori pembuatan kebijakan luar negeri) dan sebagai pendukung Korea Utara membatalkan perjanjian ini, penulis akan menggunakan konsep integrasi oleh Frances Pinter.

¹² (*Kompas*, Kamis, 31 Januari 2009)

¹³ <http://www.lampungpost.com/cetak/cetak.php?id=2009013100401657>

Berdasarkan pada konsep integrasi oleh Frances Pinter yang menyatakan bahwa “Integration when seen as states of affairs criteria are set and integration has occurred when these requirements are met. Disintegration occurs when the criteria which were formally met are no longer fulfilled.” Disini ia menyatakan bahwa suatu integrasi akan terlaksana jika kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan oleh setiap pihak dapat tercapai atau setidaknya secara normatif mereka tidak rugi.

Teori pembuatan keputusan mengidentifikasi sejumlah besar variabel yang relevan dan mengemukakan saling keterkaitan yang mungkin ada dari berbagai variabel tersebut. Selain itu teori ini mengarahkan perhatian secara langsung bukan kepada negara sebagai abstraksi metafisik, atau kepada pemerintah, atau bahkan kepada institusi besar yang disebut “eksekutif,” melainkan berusaha menonjolkan perilaku manusia khusus pembuat keputusan yang sesungguhnya membentuk kebijaksanaan pemerintah, yaitu “mereka yang tindakan otoritatifnya, baik maksud maupun tujuannya adalah tindakan negara. Tindakan negara adalah tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukannya atas nama negara.”¹⁴

Teori pembuatan keputusan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan luar negeri. Batasan politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah: “Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh

¹⁴ James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Study*, terjemahan Amien Rais, Harwanto dan Tulus Warsito, dalam Harwanto Dahlan, *Modul Diplomasia: Politik Luar Negeri*, (diakses, 1 November, 2008); FISIPOL UMY, 2000, hal. 1.

para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasionalnya yang spesifik, dituangkan dalam terminologi kepentingan nasionalnya”. Dari definisi tersebut terlihat empat unsur dalam politik luar negeri, yaitu strategi, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal, dan kepentingan suatu negara. Jadi politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan negara tersebut. Jadi politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan negara tersebut.¹⁵

Sedangkan William D. Coplin menyatakan bahwa :

*To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision. However, it would be mistake to think that foreign policy makers act in vacuum. On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision makers. The first is domestic politics within the foreign policy decision maker state. The second is the economic and the military capability of the state. The third is the international context the particular position in which his state finds it self especially in relation to other state in system.*¹⁶

Akan tetapi, salah besar kalau kita menganggap bahwa para pengambil keputusan politik luar negeri bertindak sembarangan. Akan tetapi, sebaliknya , tindakan politik luar negeri tertentu mungkin saja dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri.

¹⁵ Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, 3rd ed. dalam skripsi, Barid Kurnia Rakhman, *Pasang Surut Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Malaysia Dalam Kurun Waktu 1999-2007*, HI FISIPOL UMY, Yogyakarta 2008. hal.19.

¹⁶ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* dalam skripsi Nisfia Nur Wiani, *Kebijakan Korea Utara Tentang Program Pengembangan Senjata Nuklir*, HI FISIPOL UMY, Yogyakarta 2006. hal. 6

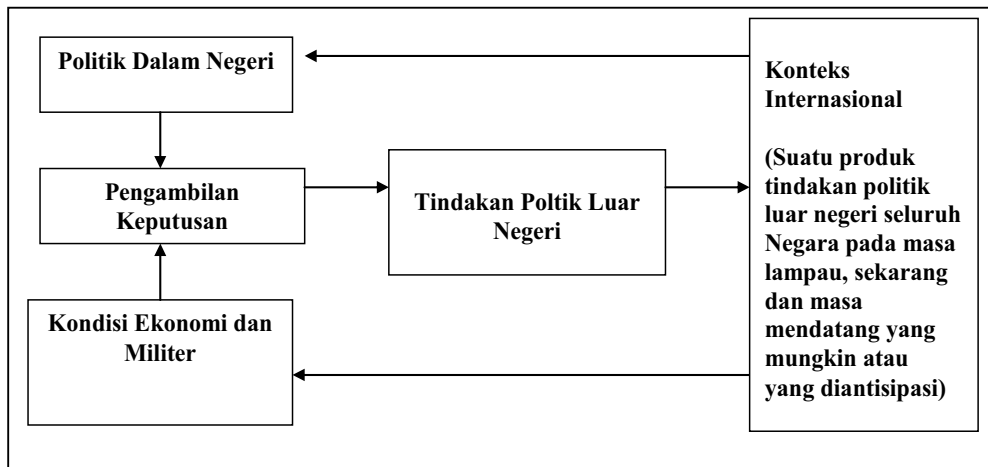
Pertama, kondisi politik dalam negeri mengambil keputusan politik luar negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer; dan ketiga, konteks internasional, posisi khusus negara dalam hubungan dengan negara lain dalam sistem itu.¹⁷

Berdasarkan pada tulisan William D. Choplin diatas pengambilan keputusan dalam menentukan politik luar negeri dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :

1. Politik Dalam Negeri
2. Kondisi Ekonomi dan Militer
3. Konteks Internasional¹⁸

Dengan adanya interaksi antara faktor-faktor itulah yang menghasilkan tindakan politik luar negeri yang digambarkan dalam skema sebagai berikut :

Gambar 1. Proses pengambilan keputusan menurut William D. Coplin



William D.Coplin, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis.

Berdasarkan pada gambar di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

¹⁷ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal 30.

¹⁸ *Ibid*

1. Politik dalam negeri

Kondisi domestik memiliki pengaruh dalam menentukan output kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk budaya dan sistem politik (autokratis maupun demokratis) yang berjalan beserta variable-variable yang mempengaruhinya. *Domestic Politic* (situasi politik dalam negeri) termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Selain itu, pembuatan kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri yang tengah dihadapi. Dimana banyak analis politik internasional berargumentasi bahwa konsekuensi-konsekuensi yang mempersatukan dari krisis eksternal sering menyebabkan para pengambil keputusan politik luar negeri, yang dihadapkan pada instabilitas di dalam negeri, menjadi agresif di luar negeri.¹⁹ Dalam politik internasional, meski negara sebagai aktor pelaku, namun manusia dengan peran sebagai pembuat keputusan melakukan aksi dan reaksi. Manusia bukan satuan yang abstrak yang biasa disebut negara, ia menetapkan dan memainkan konsep kepentingan nasional, merencanakan strategi, memaknakan isu, membuat keputusan untuk bertindak serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan. Pembuatan keputusan di dalam politik luar negeri sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu bangsa. Pada kebanyakan negara, pimpinan pemerintah (presiden, perdana menteri ataupun raja) memainkan peran sebagai pembuat keputusan suatu negara.²⁰

Negara yang komunis dan adanya figur pemimpin yang dapat memonopoli kebijakan pemerintahan menciptakan negara Korea Utara menjadi negara yang

¹⁹ *Ibid*, hal 171

²⁰ Jack C. Plano & Roy Olton, "*Kamus Hubungan Internasional*", terjem. Wawan Juanda, Putra A Bardin, 1994, hal.4

otoriter dan memiliki sistem politik yang tertutup, sehingga atmosfer politik yang tercipta cenderung statis dan hanya bergejolak pada kalangan elit partai saja, namun mereka tetap tidak dapat menyentuh kekuasaan tertinggi walaupun kekuasaan tertinggi secara *de jure* terletak pada pimpinan partai. Hal ini dikarenakan kuatnya figur seorang pimpinan militer. Sehingga yang mereka perebutkan hanya jabatan dalam pemerintahan yang lingkungannya tidak terlalu luas dan hanya bersifat administratif.

Jika dibandingkan dengan sistem politik Korea Selatan yang demokratis, para elit politik dapat bersaing secara terbuka dan melibatkan rakyat banyak. Sehingga popularitas seseorang akan sangat menentukan dalam karir politik. Tentunya akan sangat timpang jika mereka disandingkan dan tentunya akan diketahui secara jelas dari kalangan elit mana yang akan bertahan jika negara ini bergabung.

2. Kondisi ekonomi dan militer

Faktor ke dua ini tidak kalah penting yaitu, keadaan ekonomi dan militer, sangat mempengaruhi kemampuan diplomasi suatu negara, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan dalam pertahanan dan keamanan. Faktor ekonomi dan militer memainkan penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri karena berpengaruh terhadap kekuatan menekan yang harus dimiliki dalam hubungan luar negerinya. Negara-negara yang mempunyai kemampuan ekonomi dan militer yang kuat dipastikan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam hubungannya dengan negara lain. Kemampuan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan melihat GNP-nya (Gross

National Product), yaitu semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. Selain GNP, indikator ekonomi lainnya adalah GNP perkapita atau pendapatan perkapita serta dengan melihat potensi pertumbuhan ekonomi tersebut.²¹ Jadi dapat diasumsikan bahwa, semakin besar GNP negara bersangkutan maka semakin makmur dan kayalah negara tersebut. Ada pun dalam hal militer, kekuatan militer suatu negara dapat ditaksir kapasitasnya dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan, serta sifat perlengkapan militer.²² Dengan majunya perekonomian suatu negara, maka alokasi untuk pendanaan militer pun akan semakin besar. Namun ada juga negara miskin yang mengalokasikan dana untuk militer lebih besar dari pada untuk pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan oleh dasar dari kekuatan nasional negara ini bertumpu pada militer. Biasanya negara yang berdasarkan militer adalah negara yang sedang bertikai atau bersengketa dengan negara lain.

Ekonomi dan militer merupakan faktor yang terkait satu sama lain. Antara yang satu dengan yang lain saling menunjang. Perkembangan ekonomi mendorong kemajuan militer, baik itu dari segi kuantitas pasukan dan persenjataan maupun pendanaan untuk pengembang militer itu sendiri. Kestabilan perkonomian juga ditunjang oleh keamanan negara tersebut. Dalam hal ini kestabilan keamanan. Dengan adanya keamanan yang terjamin mendorong masyarakat untuk berusaha mencapai perekonomian yang lebih baik.

²¹ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal 115

²² *Ibid*, hal 124

Dalam kondisi negara yang masih dalam perkembangan bahkan cenderung miskin dan ketika keamanan nasional menjadi hal yang sangat penting. Antara ekonomi dan keamanan tidak dapat berjalan beriringan, salah satu harus dikorbankan. Dalam kasus Korea Utara yang bersengketa dengan saudaranya yang berada di belahan selatan, kekuatan militer menjadi prioritas utama sebagai sarana pendukung keamanan nasional. Dalam mendukung kekuatan militer, perkembangan perekonomian dikorbankan, hal di buktikan dengan anggaran yang dipersiapkan untuk militer lebih besar dibandingkan untuk pengembangan perekonomian. Pemujaan terhadap pimpinan Korea Utara terdahulu memudahkan dalam mendoktrin rakyat Korea Utara untuk setia dan rela berkorban atas nama negara.

3. Konteks internasional

Kondisi internasional mempengaruhi aktivitas dan kebijakan politik luar negeri. Pengaruh yang ditimbulkan berasal dari tiga elemen, yaitu geografis, ekonomi dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu; dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antar negara itu dengan negara-negara lainnya.

Dari ketiga elemen itu, elemen geografi merupakan elemen yang memainkan peran politik luar negeri yang penting, meskipun bukan peran terpenting seperti seperti yang diberikan oleh para ahli geopolitik pada masa lalu. Russett mendemonstrasikan betapa proksimitas atau kedekatan geografis berhubungan

dengan perdagangan antar negara, perilaku pemberian suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan keanggotaan bersama dalam organisasi-organisasi antar pemerintah, meskipun di beberapa kawasan hubungan itu lebih erat dari pada kawasan lain.

Dalam konteks internasional, ekonomi menjadi elemen yang sangat penting. Hubungan kerjasama, bantuan maupun boikot ekonomi dapat sangat mempengaruhi tindakan politik luar negeri suatu negara.

Hubungan politik dengan negara-negara lain sangat mempengaruhi dalam lingkungan sangat berperan dalam pengambilan keputusan-keputusan politik luar negeri suatu negara. Erat dan longgarnya hubungan suatu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi suatu negara dalam mengambil suatu keputusan khususnya untuk memperoleh dukungan dari negara lain mengenai tindakan luar negeri.

Pasang surut hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan tidak hanya mempengaruhi hubungan kedua negara, namun juga menyebabkan perubahan kondisi politik internasional yang dapat meluas hingga keseluruh belahan bumi. Lihat saja ketika kedua Korea setuju untuk mengadakan perundingan, yang merayakan tidak hanya kedua negara, namun hampir seluruh sudut bumi bersorak sorai menyambut bentuk perdamaian dunia.

Tidak tercapainya kata sepakat dalam *six party talk* mendorong Korea Utara meneruskan proyek pengayaan uranium yang kemudian memunculkan tekanan yang dilakukan oleh presiden Korea Selatan terpilih, Lee Myung Bak, melalui

kebijakan-kebijakan yang diputuskannya berkenaan dengan bantuan terhadap Korea Utara, memaksa Korea Utara bersikap lebih agresif.

E. Hipotesa

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik hipotesa bahwa keputusan Korea Utara untuk membatalkan perjanjian reunifikasi Korea dikarenakan oleh :

1. Faktor Internal

- Adanya kekhawatiran para elit politik termasuk Kim Jung Il akan kehilangan kekuasaan
- Kerjasama ekonomi membuat perekonomian Korea Utara menjadi subordinatif

2. Faktor Eksternal

- Reunifikasi menjadi instrumen yang dapat menekan militer Korea Utara
- Pemerintahan Korea Selatan meninjau kembali perjanjian yang dicapai pada tahun 2000 dan 2007

F. Tujuan Penulisan

Secara umum penulisan ini penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong Korea Utara membatalkan perjanjian reunifikasi Korea, padahal reunifikasi ini sangat baik dalam tercapainya perdamaian dunia khususnya perdamaian di Asia Timur.

Tujuan dari penulisan ini juga adalah sebagai sarana kami untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah secara teoritik yang kemudian digunakan secara aplikatif.

Penulisan juga merupakan tindakan komunikasi penulis dalam menyampaikan hasil penelitian dari penulis kepada masyarakat luas khususnya bagi kaum akademisi yang tertarik untuk mendalami pengetahuan tentang studi Korea.

G. Jangkauan Penelitian

Agar penelitian dan penulisan tidak meluas dan membuat pemaknaan akhir menjadi tidak jelas, maka penulis membatasi penelitian dan penulisan dari dilakukannya perjanjian reunifikasi pada tahun 2000 oleh kedua Negara hingga dibatalkan perjanjian itu oleh Korea Utara tepatnya tanggal 31 Januari 2009. Penulis akan menyinggung data-data dan fakta-fakta diluar dari jangkauan penelitian dalam penulisan jika diperlukan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik studi literature yang relevan dengan topik permasalahan yang diteliti. Adapun referensi yang digunakan adalah buku, berita, artikel dalam surat kabar, artikel dalam majalah dan jurnal serta data dari internet. Selain dari sumber-sumber tersebut penulis juga menggunakan televisi maupun sumber yang bersifat dokumenter sebagai penunjang penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dapat dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang meliputi, alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, tujuan penulisan, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, kerangka penulisan.

BAB II Sejarah dan perkembangan reunifikasi Korea, yang meliputi sejarah reunifikasi, perbandingan Korea Selatan dan Korea Utara, tujuan dan prinsip reunifikasi, kerjasama yang dicapai, dialog antar Korea.

BAB III Faktor internal pembatalan reunifikasi Korea. Berisi tentang kekhawatiran elit Korea Utara akan kehilangan kekuasaan, keberlangsungan kekuasaan keluarga Kim, ekonomi yang subordinatif.

BAB IV Faktor eksternal pembatalan reunifikasi Korea, yang berisi pengurangan kekuatan militer Korea Utara sebagai konsekuensi reunifikasi, Korea Selatan meninjau kembali perjanjian.

BAB V KESIMPULAN